



ETPD SERTA URGENSI TP2DD DALAM IMPLEMENTASI ETPD

Disampaikan oleh: Ni Putu Myari Artha, SSTP, Msi

Dasar Hukum

1

Peraturan Presiden Nomor 95
Tahun 2018 tentang Sistem
Pemerintahan Berbasis
Elektronik

2

Peraturan Pemerintah Nomor
12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah

3

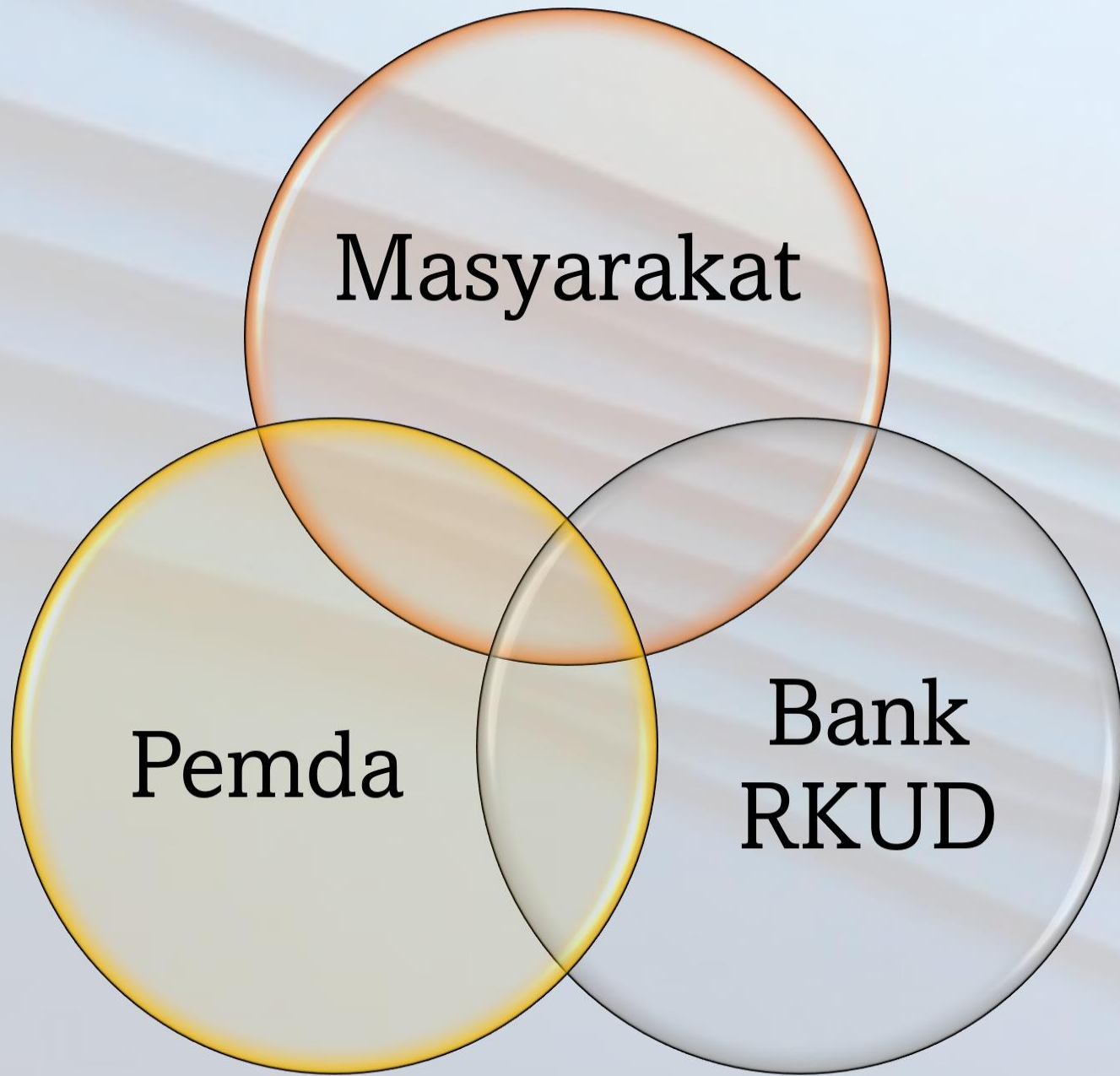
Keputusan Presiden Nomor 3
Tahun 2021 tentang Satuan
Tugas Percepatan dan
Perluasan Digitalisasi Daerah

4

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 56 Tahun 2021
tentang TP2DD
Provinsi/Kabupaten/Kota dan
Tata Cara Implementasi ETPD

5

Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 77 Tahun 2020
ttg Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah



Masyarakat

Pemda

Bank
RKUD



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
BADAN KEUANGAN DAN PENDAPATAN DAERAH

BSG
BONEBOL

MAKIN MUDAH Bayar PAD Via BSGtouch

Bayar Pajak/Retribusi dimana saja dan kapan saja dengan "satu sentuhan".

" Nikmati kenyamanan bertransaksi dengan menggunakan Mobile Banking Bank SulutGo BSGtouch yang dapat diakses melalui ponsel dengan berbasis internet, kapanpun dan dimanapun."

Cara Bayar Via Aplikasi BSG Touch:

- Buka Aplikasi BSG Touch
- Pilih Menu Pembayaran
- Pilih Instansi & Jenis PAD yang dibayar
- Masukkan NRP/ Kode eBilling
- Masukkan PIN dan Pembayaran telah Berhasil.

*Kuti petunjuk pembayaran di e-Billing anda buat eBilling di sikap.bkpd.bonebolangokab.go.id

Google Play

PETUNJUK DAN INFORMASI LAYANAN:
Live Web Chat dan WA Center: 0823 3433 8577

#PajakRetribusiKitaMembangunBoneBolango
#Bonebolcemerlang
#BoneBolango

Bank Sulselbar

BAYAR TAGIHAN PBB SEKARANG MAKIN HEMAT

DI Shopee

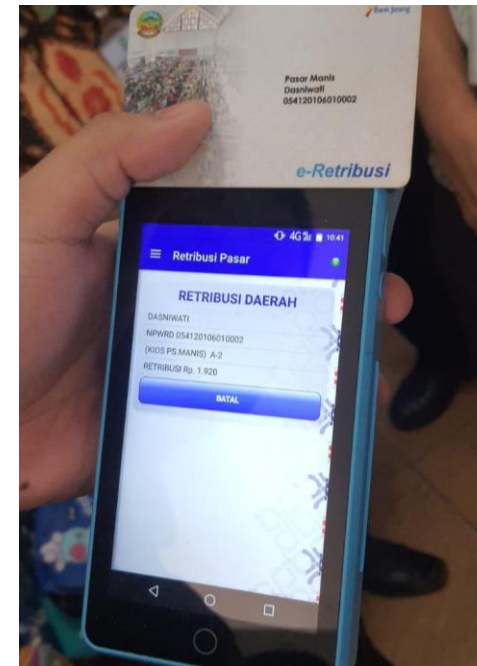
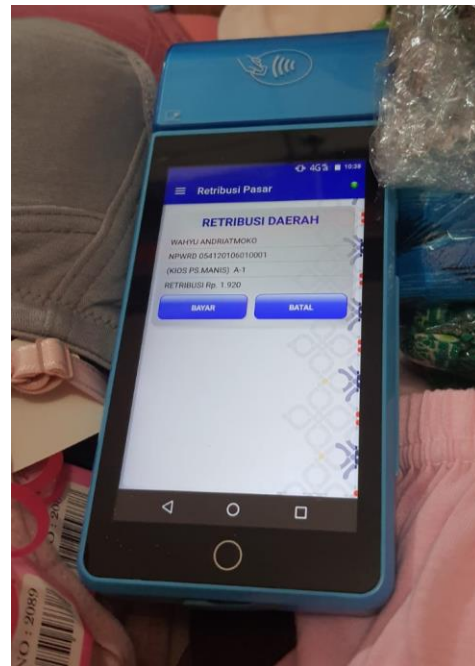
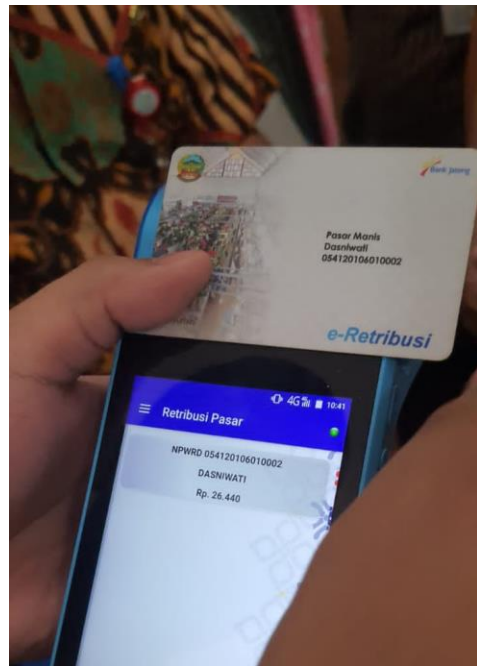
CASHBACK 90%

Baru

PBB

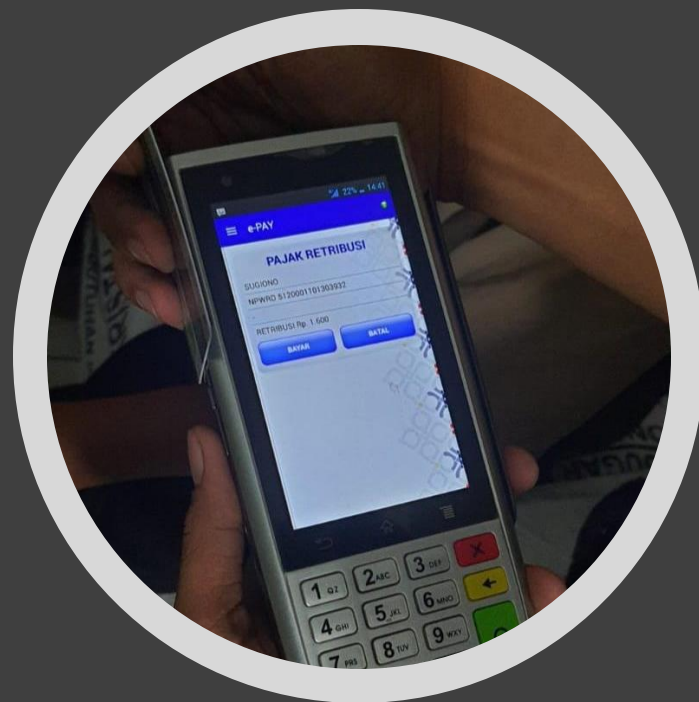


Cerita Mudah Membayar Pajak Daerah dan Retribusi

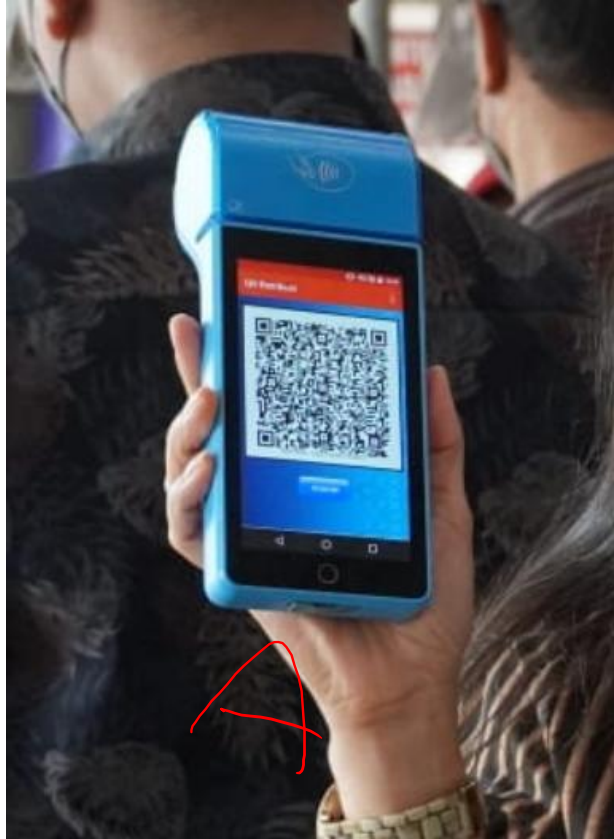


Retribusi Pasar

“Uang Elektronik – Close Loop”



Uang Elektronik – Close Loop



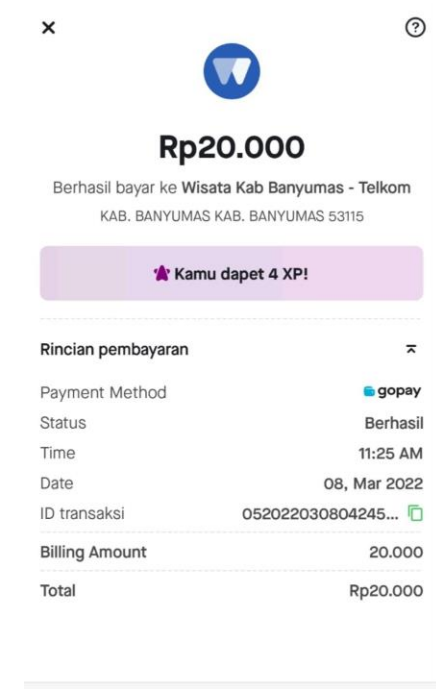
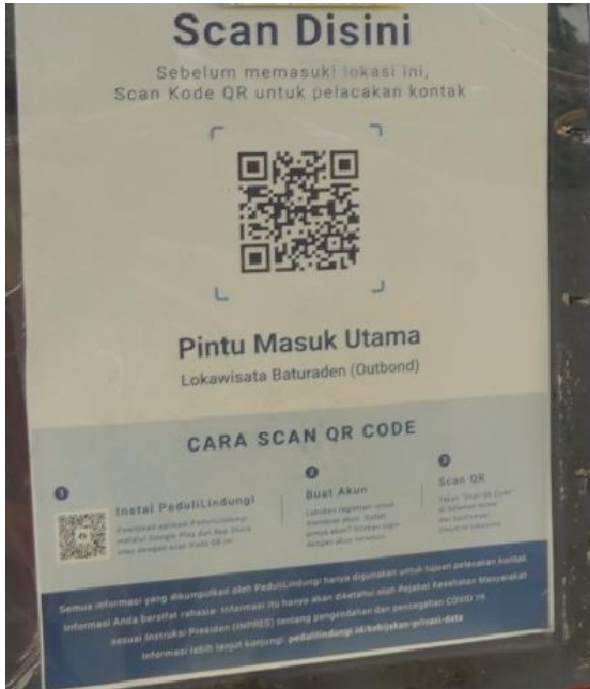
Rp1.050

Berhasil bayar ke **Retribusi Pasar Manis - Telkom**
KAB. BANYUMAS KAB. BANYUMAS 53131

Rincian pembayaran	
Payment Method	gopay
Status	Berhasil
Time	10:48 AM
Date	08, Mar 2022
ID transaksi	0220220308034846...
Billing Amount	1.050
Total	Rp1.050

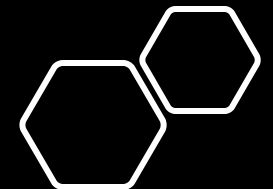
Retribusi Pasar

- Absen – Qris Dinamis – Bayar – Bukti Bayar



Retribusi Wisata

- Tracking jumlah pengunjung
- Elektronifikasi pembayaran retribusi



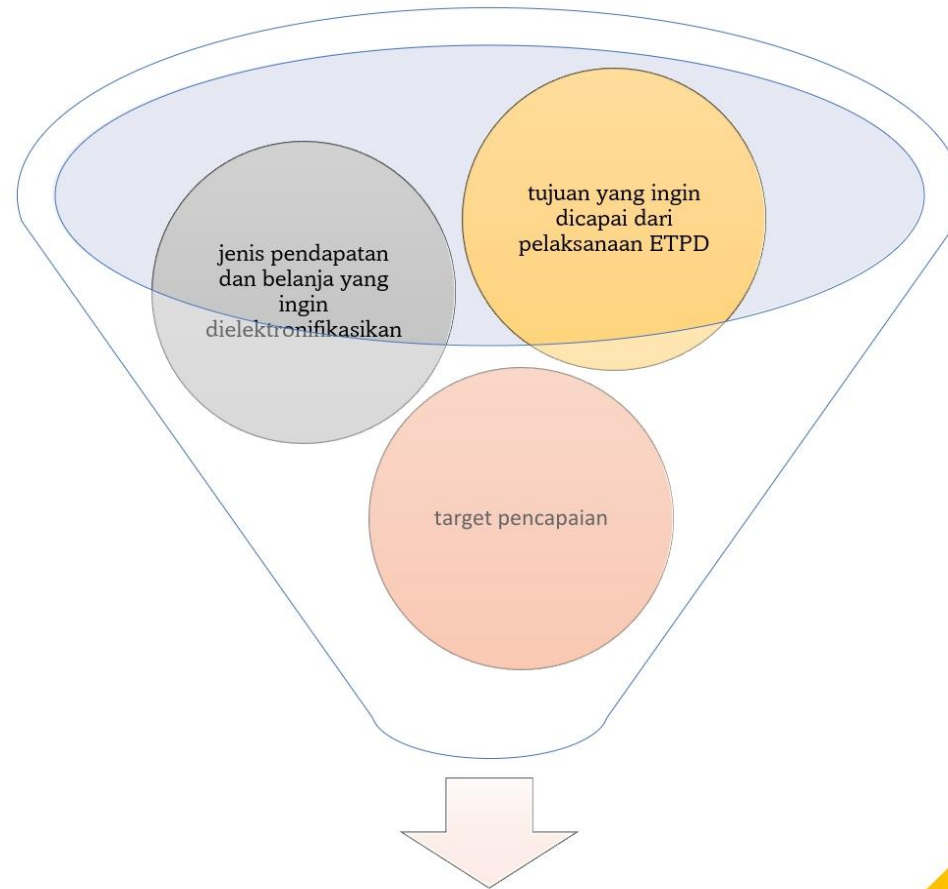
PENYUSUNAN PETA JALAN

BAHAN/DATA/DOKUMEN – PIHAK TERLIBAT - PROSEDUR - TEMPLATE

Pasal 12 ayat (1)

Peta jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a paling sedikit memuat:

1. tujuan yang ingin dicapai dari pelaksanaan ETPD;
2. jenis pendapatan dan belanja yang ingin dielektronifikasikan; dan
3. target pencapaian



Implementasi ETPD

Hal-hal yang perlu mendapat perhatian dalam penyusunan Peta Jalan ETPD



*“a sense of
belonging”*

anggota TP2DD



Ketua	:	Gubernur
Wakil Ketua	:	pemimpin kantor perwakilan Bank Indonesia
Ketua Pelaksana Harian	:	sekretaris daerah provinsi
Sekretaris	:	kepala perangkat daerah yang membidangi pendapatan daerah provinsi
Anggota	1	kepala perangkat daerah yang membidangi pengelolaan keuangan dan aset provinsi
	2	kepala perangkat daerah yang membidangi komunikasi dan informasi provinsi
	3	kepala perangkat daerah penghasil pendapatan daerah provinsi
	4	kepala perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah provinsi
	5	inspektur daerah provinsi
	6	pejabat kantor perwakilan Bank Indonesia
	7	pejabat Otoritas Jasa Keuangan perwakilan daerah
	8	direktur utama pada Bank Kas Daerah
	9	pejabat kantor wilayah instansi vertikal Kementerian Keuangan
	10	pejabat instansi vertikal dan/atau pemangku kepentingan terkait lainnya sesuai dengan kebutuhan



Perkembangan
Transaksi Nontunai



Kondisi Geografis
dan Demografis
Wilayah



Perkembangan
perekonomian dan
fiskal daerah



Gambaran Jaringan
Komunikasi



Gambaran
Infrastruktur Bank
RKUD



Gambaran
Pengembangan
Infrastruktur Bank
RKUD



Gambaran
pemerintah daerah



Kendala dan
Permasalahan



Rencana Kerja ETPD



Target ETPD tiap
jenis pendapatan dan
belanja daerah

Contoh Gambaran Transaksi Non Tunai

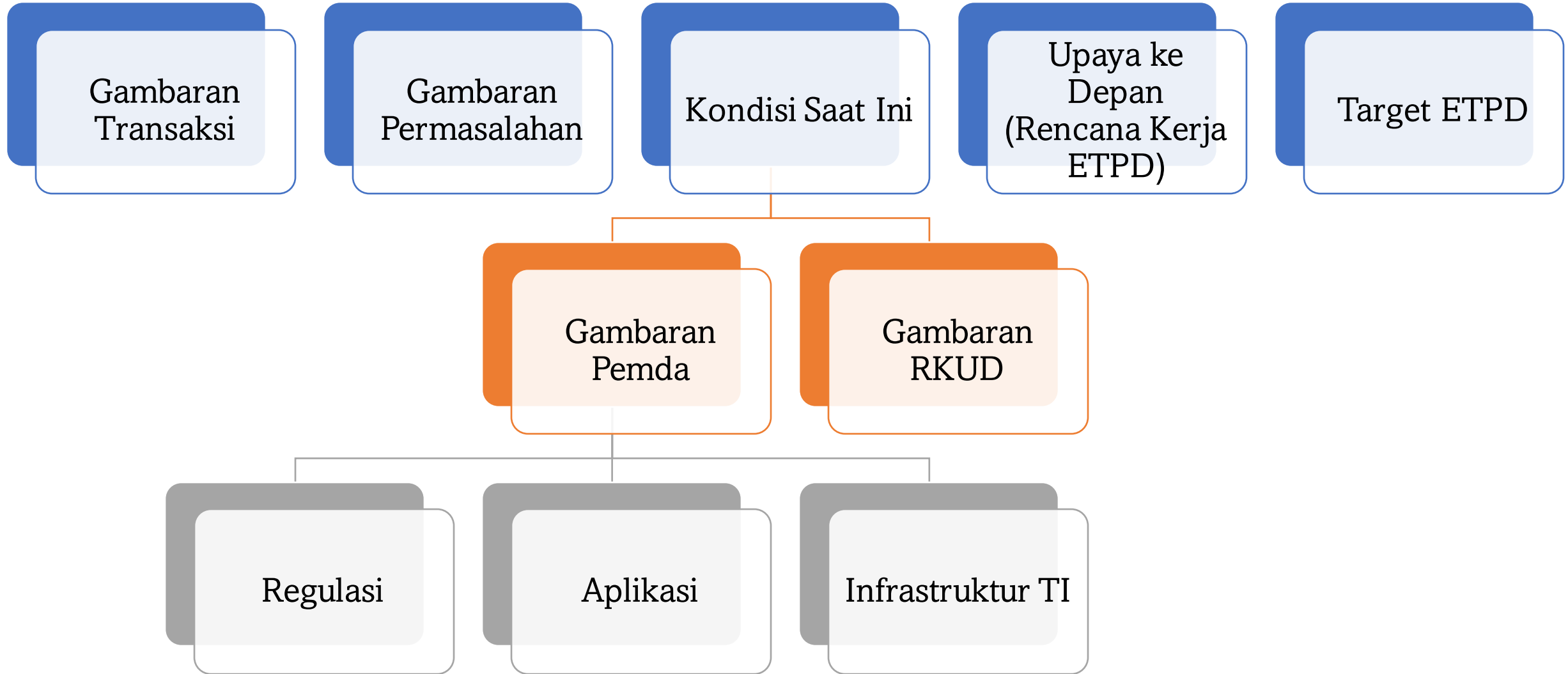
Jenis	Tunai	Nontunai	Non Tunai
		Semi Digital	Digital
Pajak Hotel	50%	30%	20%
Pajak Restoran	90%	10%	0%
Dst			



URAIAN	TUNAI	KANAL SEMI DIGITAL		KANAL DIGITAL					Total Kanal Digital
		Teller Bank	Agen Bank	Qris	ATM	Mobile Banking	E Commerce	kanal lain	
Pajak Hotel	-	10,147,576,024 92.42%	762,150,073 6.94%	- 0%	62,450,693 0.57%	7,554,760 0.07%	- 0%	- 0%	70,005,453 0.64%
Pajak Restoran	-	58,075,641,395 91.86%	4,236,299,657 6.70%	- 0%	323,943,587 0.51%	586,307,352 0.93%	- 0%	- 0%	910,250,939 1.44%
Pajak Hiburan	-	3,905,933,077 95.59%	33,631,037 0.82%	- 0%	143,611,840 3.51%	3,064,555 0.07%	- 0%	- 0%	146,676,395 3.59%
Pajak Reklame	-	897,692,890 89.08%	110,000,000 10.92%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0.00%
PPJ	-	72,639,157,006 100%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%	- 0%
Pajak Parkir	-	3,855,241,097 86.68%	296,876,800 6.68%	- 0%	- 0%	295,329,500 6.64%	- 0%	- 0%	295,329,500 6.64%
Pajak Air Tanah	-	3,000,802,796 95.86%	83,550,888 2.67%	- 0%	7,804,458 0.25%	38,347,070 1.22%	- 0%	- 0%	46,151,528 1.5%
PBB-P2	-	84,935,031,037 91.89%	5,252,238,935 5.68%	13,418,402 0.015%	- 0%	1,780,178,602 1.93%	256,678,882 0.28%	192,064,473 0.21%	2,242,340,359 2.43%
BPHTB	-	173,026,413,309 99.68%	492,871,000 0.28%	- 0%	60,750,000 0.03%	- 0%	- 0%	- 0%	60,750,000 0.03%
JUMLAH PAJAK DAERAH	0%	410,483,488,639 96.47%	11,267,618,390 2.65%	13,418,402 0.003%	598,560,578 0.14%	2,710,781,839 0.64%	256,678,882 0.06%	192,064,473 0.05%	3,771,504,174 0.89%

Contoh Target ETPD

	2021	2021	2021	2022	2022	2022	dst
Jenis	Tunai	Non Tunai	Nontunai	Tunai	Non tunai	Nontunai	
		Semi Digital	Digital		Semi Digital	Digital	
Pajak Hotel	50%	30%	20%	30%	30%	40%	
Pajak Restoran	90%	10%	0%	50%	20%	30%	
Dst							





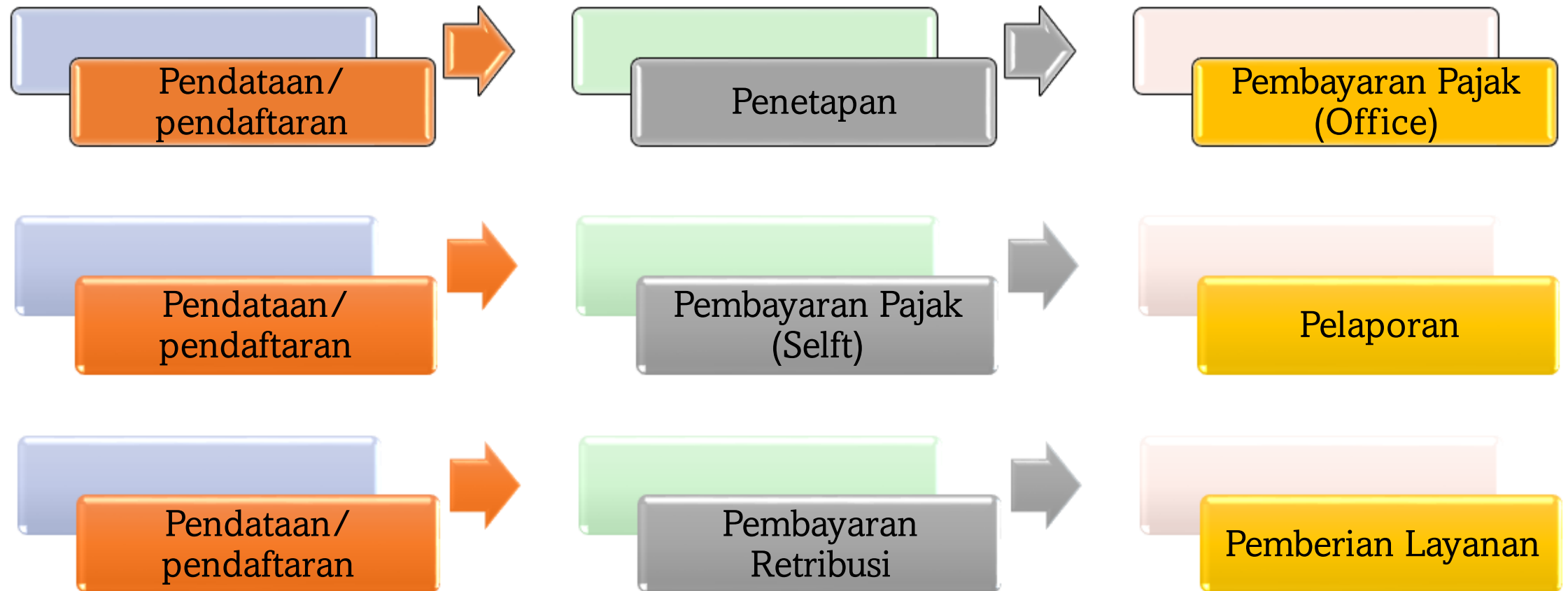
**Pasal 13
ayat (1)**

Peta jalan
sebagaimana
dimaksud
dalam Pasal
12 sebagai
dasar
penyusunan
rencana aksi
implementasi
ETPD.

Proses Bisnis

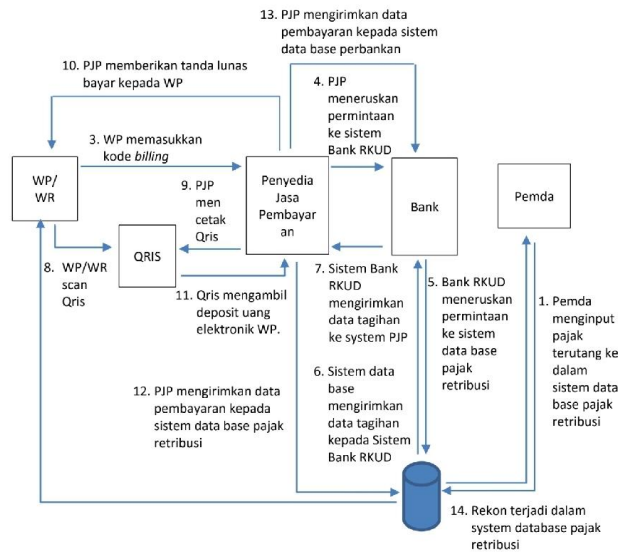
Pengelolaan dan Pembayaran

Digitalisasi dalam Pemungutan Pajak dan Retribusi

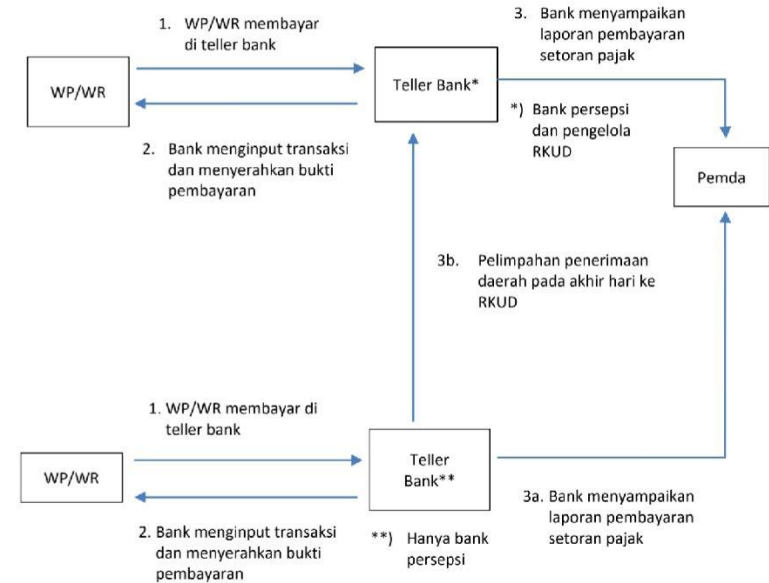


Elektronifikasi dalam Pembayaran Pajak dan Retribusi

Cerita *Back Office* Kemudahan Membayar Pajak Retribusi



Gambar 8.4 Proses Bisnis Pembayaran Melalui QRis Dinamis untuk yang Ditetapkan KDH

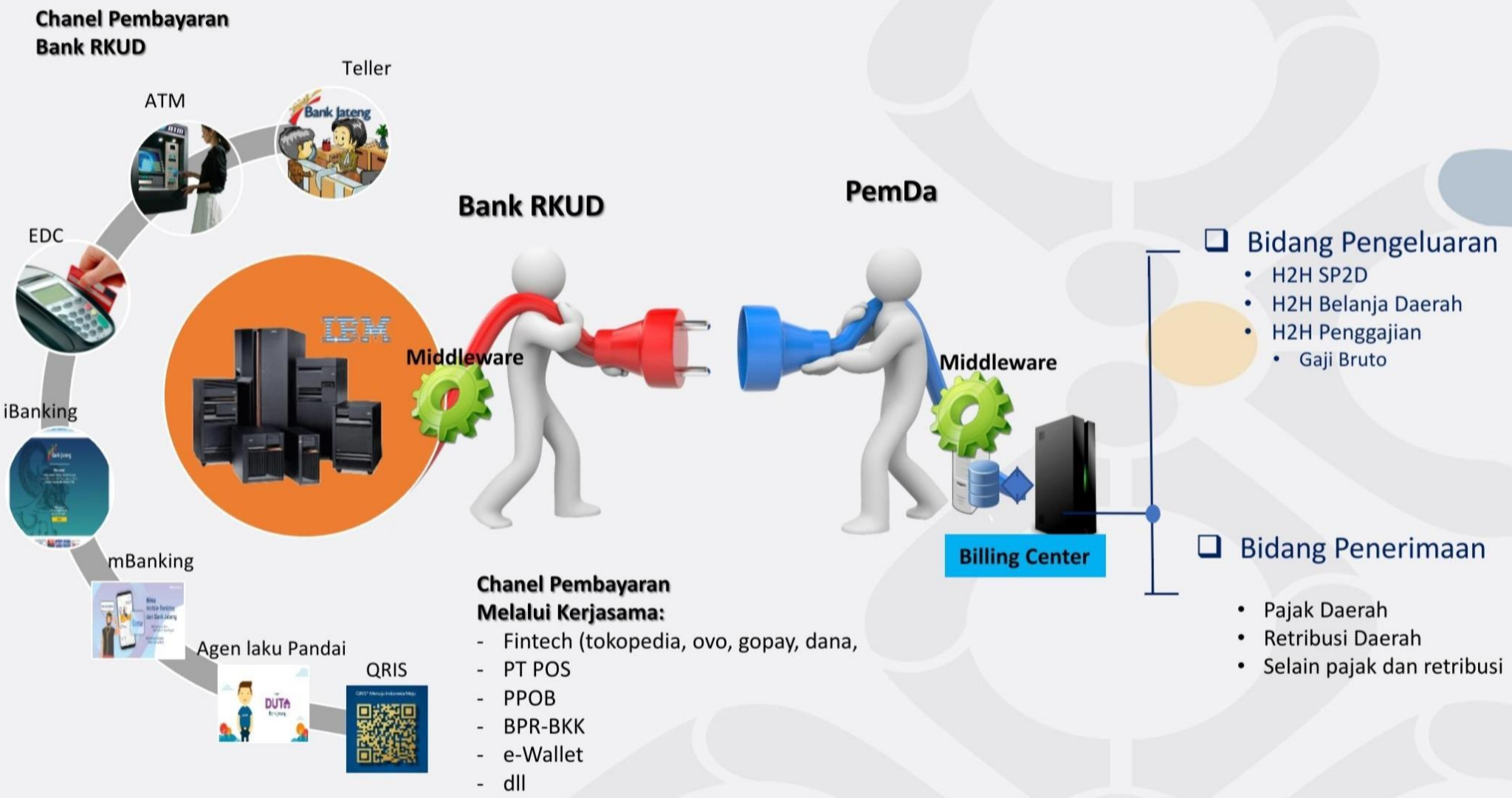


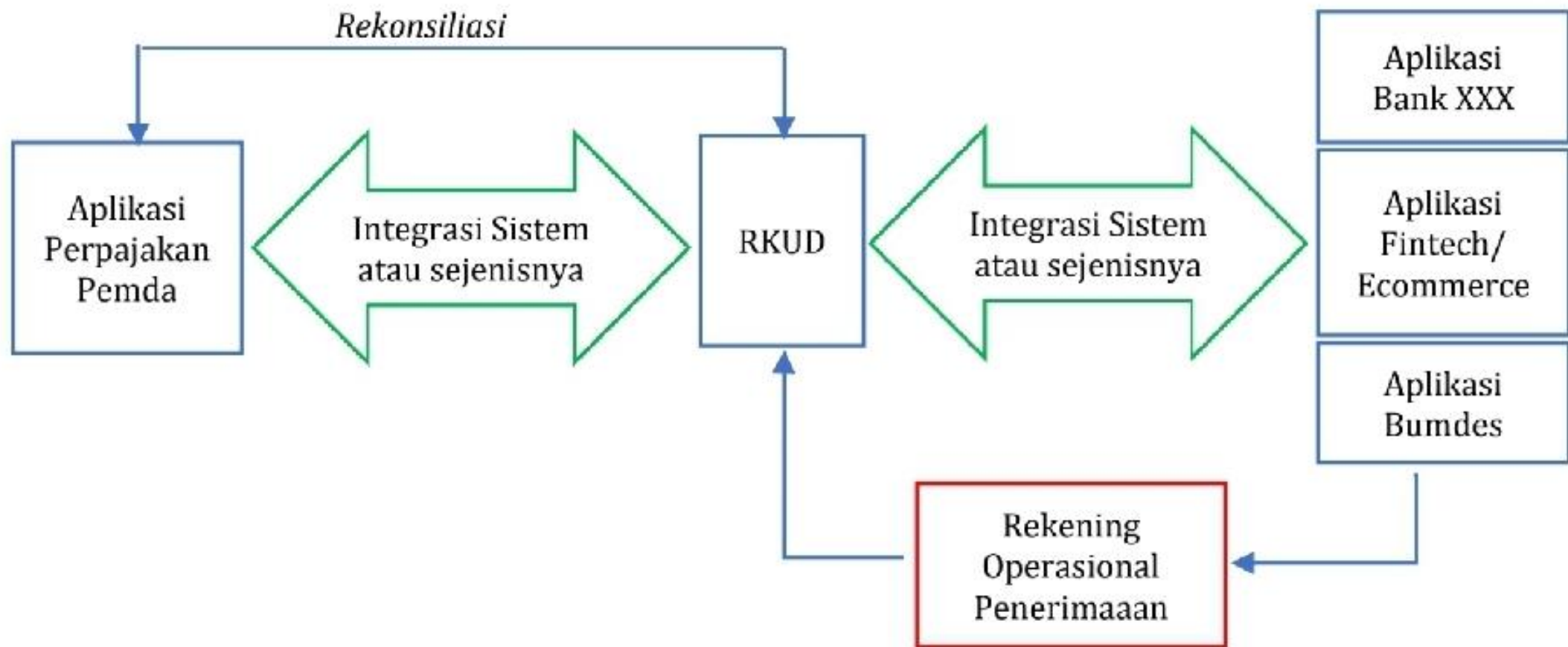
Gambar 8.1 Proses Bisnis Pembayaran Melalui Teller Bank

Kerjasama

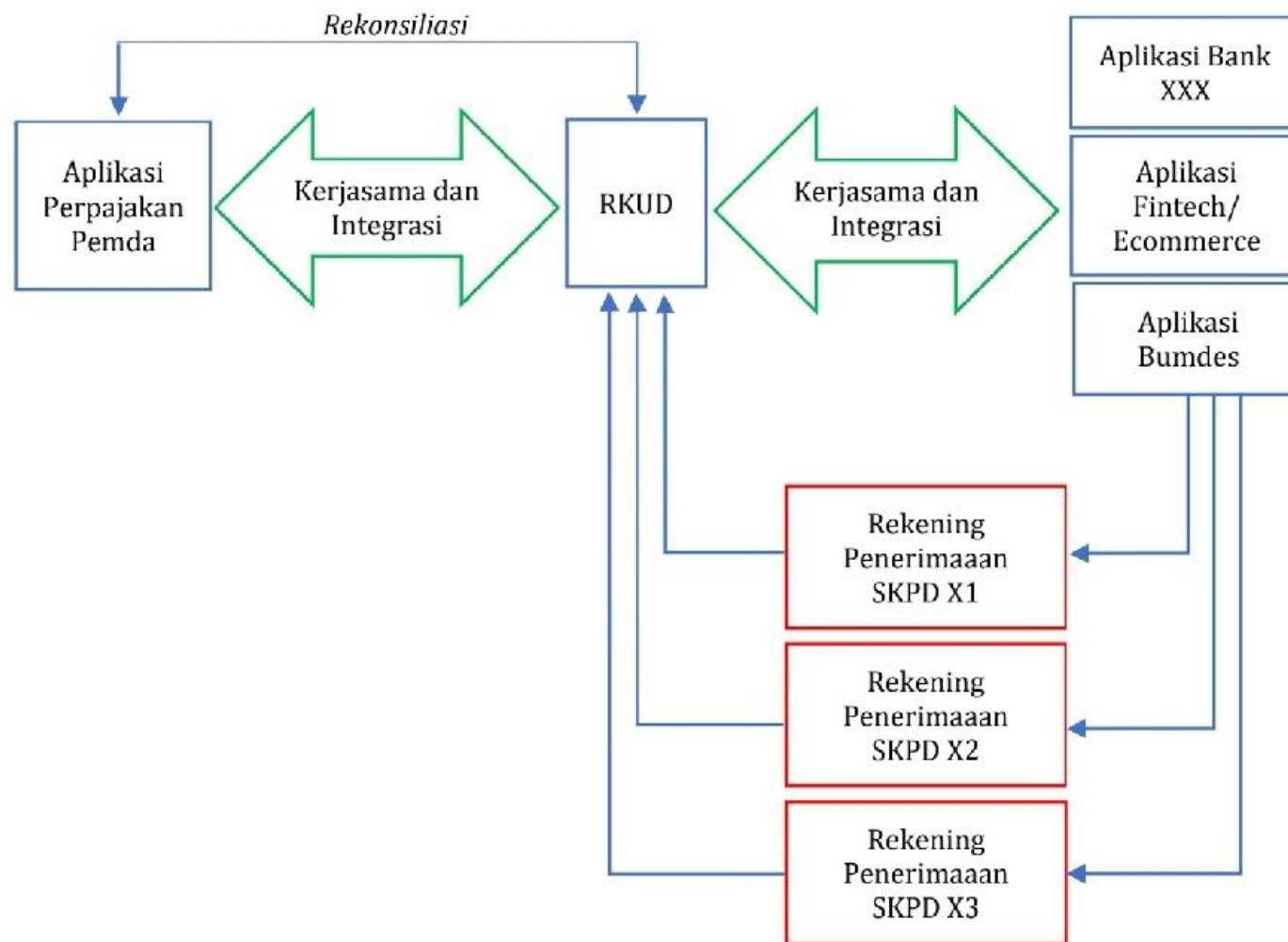
Pemda – Bank RKUD - PJP

TOPOLOGI JARINGAN H2H





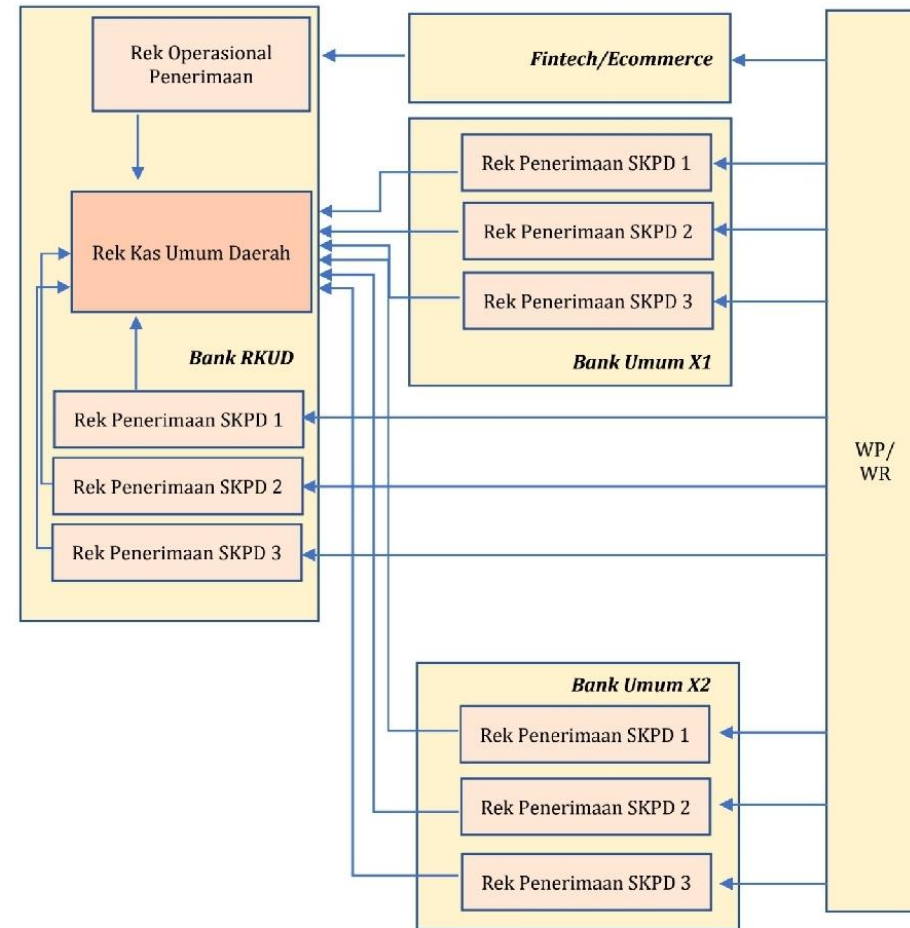
Gambar 9.1 Kedudukan Rekening Operasional Penerimaan



Gambar 9.2 Kedudukan Rekening Penerimaan SKPD

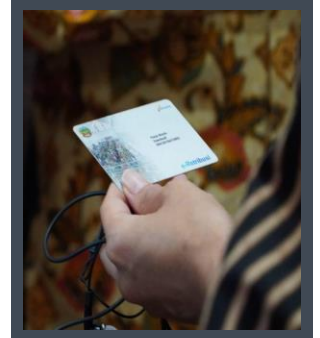
Penempatan Rekening Pemda

3. Penempatan Rekening Penerimaan SKPD

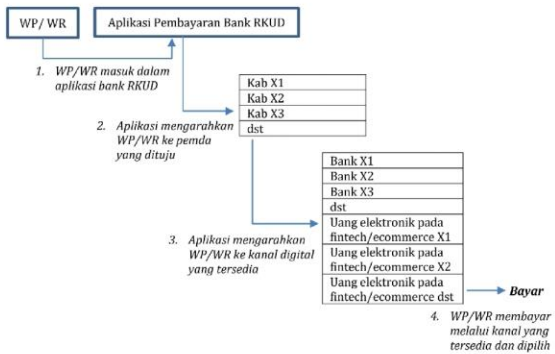


Gambar 9.3 Penempatan Rekening Penerimaan SKPD

Akses bayar WP/WR

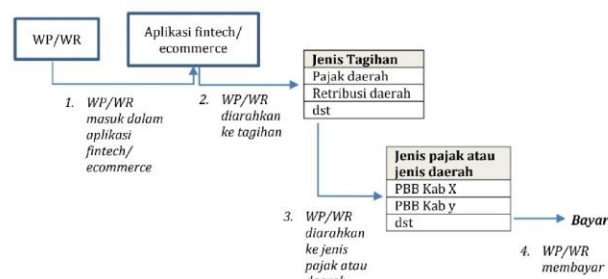


4.2. Akses Membayar Melalui Aplikasi Bank RKUD



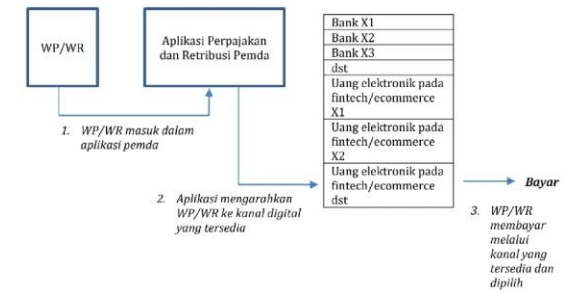
Gambar 9.5 Akses Membayar Melalui Aplikasi Bank RKUD

4.3. Akses Membayar Melalui Aplikasi Fintech/Ecomers



Gambar 9.6 Akses Membayar Melalui Aplikasi Fintech/Ecommerce

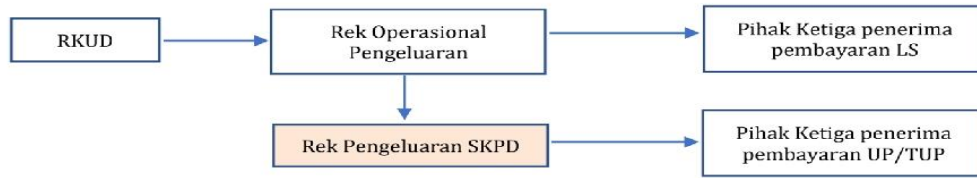
4.1. Akses Membayar Melalui Aplikasi Penda



berbelanja online. Melalui skema ini, masyarakat dimudahkan dengan satu aplikasi dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari sekaligus dapat menjalankan kewajiban perpajakannya.

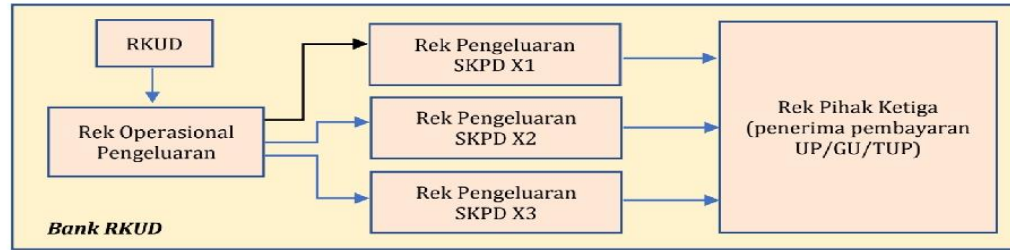
B. PENGELUARAN DAERAH

1. Kedudukan Rekening Operasional Pengeluaran dan Rekening Pengeluaran SKPD



Gambar 9.7 Kedudukan Rekening Operasional Pengeluaran dan Rekening Pengeluaran SKPD

2. Penempatan Rekening Pengeluaran SKPD

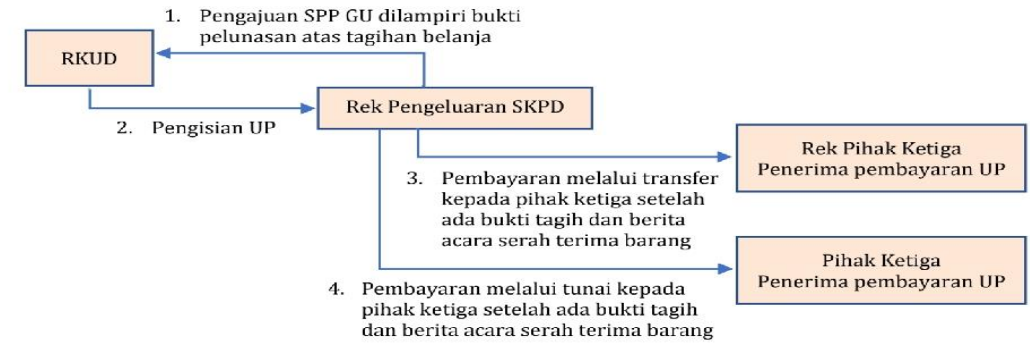


Gambar 9.8 Penempatan Rekening Pengeluaran SKPD

Rekening pengeluaran SKPD ditempatkan pada Bank yang sama dengan penempatan RKUD. Hal ini ditujukan untuk menghindari biaya transfer ketika pemindahbukuan dari RKUD ke rekening pengeluaran SKPD karena aktivitas pemberian UP/GU/TUP. Dalam rangka pelaksanaan belanja daerah dari UP/GU/TUP, dan agar belanja daerah tidak terbebani biaya transfer antar bank, rekanan pemerintah daerah sebagai pihak ketiga menempatkan rekening pada bank yang sama dengan penempatan rekening pengeluaran SKPD.

3. Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa dari UP

Disamping melalui transfer, pelaksanaan belanja daerah dari UP/GU/TUP juga dapat dialihkan ke penggunaan kartu kredit dengan prosentase tertentu dari UP. Sehingga pembayaran kepada pihak ketiga dapat ditanggulangi terlebih dahulu oleh bank penerbit kartu kredit. SKPD selanjutnya berkewajiban melakukan pelunasan kewajiban pembayaran pada waktu yang disepakati dengan pelunasan secara sekaligus.



Gambar 9.9 Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa Dari UP Melalui Transfer Dan Tunai



Gambar 9.10 Pembayaran pengadaan barang/jasa dari UP melalui kartu kredit

Sekian
terimakasih 😊



KEMENTERIAN DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA



Self Learning

